

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:7), laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Rahmi (2021:38) , laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan tersebut akan dapat mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan”

Laporan keuangan menurut Hery (2017), laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis”

Hery (2016:3) juga menyatakan bahwa:

“Laporan kuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, yang menunjukan kondisi Kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 9 (2018:1.3), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2013 dalam (Saroji, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari proses akuntansi untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen serta sebagai sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:10-11), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
7. informasi keuangan lainnya.”

Sedangkan menurut Hery (2016:4), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan Keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.”

2.1.1.3 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:11-12), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa belakang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

2.1.1.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ektern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021), adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:
 - a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
 - b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.
 - c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.
2. Manajemen
Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:
 - a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
 - c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
 - d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.
3. Kreditor
- Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
 - b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang dibuat.
 - c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
- Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:
- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
5. Investor
- Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau

kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber dana pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tentunya seperti faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada masyarakat atau pihak lainnya. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10

(2018:1.4), laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan

paragraf 25-46 (2014:7012), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

a. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya.

Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- d. **Pertimbangan Sehat**
 Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - e. **Kelengkapan**
 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
4. **Dapat dibandingkan**
 Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:
- a. **Tepat Waktu**
 Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
 - b. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**
 Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
 - c. **Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif**
 Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
 - d. **Penyajian Wajar**
 Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang

menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.7 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21) unsur-unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomiknya. Kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan unsur-unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam unsur-unsur laporan posisi keuangan; dengan demikian, Kerangka Konseptual ini tidak mengidentifikasi unsur-unsur dalam laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset/Aktiva

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Menurut Hidayat (2018:14-18) pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) “Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah, uang Kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam Undang-undang.
- d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai

nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya

2) Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a) Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b) Aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*), adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e) Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya: gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

b. Liabilitas/Kewajiban

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2016:21), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

Menurut Hidayat (2018:21), kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- 2) Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan Undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6) Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- 1) Hutang Obligasi
- 2) Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu

3) Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Menurut Hidayat (2018:19), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (common stock), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan, agio/disagio adalah keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham sedangkan laba ditahan (retained earning) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif menurut Kieso et al., (2017:206), adalah sebagai berikut:

“Perusahaan memasukkan pos-pos yang tidak diakui dalam laporan laba rugi pada sebuah ukuran yang disebut laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif (comprehensive income) mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi: semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, tetapi memengaruhi ekuitas. Pos-pos ini perubahan ekuitas nonpemilik yang tidak diakui dalam laporan laba rugi disebut dengan penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income)”.

Menurut Hidayat (2018), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- a. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan Baku (*Raw Material*)
 - 2) Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - 3) Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan bebanbeban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (*selling expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain). Biaya umum dan administrasi (*general and administration expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi, dan lain-lain).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*) Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba Ditahan (*Retained Earning*) Laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Wijaya (2017), laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menggambarkan rincian dan posisi ekuitas perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.

Menurut SAK ETAP (2009:26), tujuan laporan perubahan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Menurut (Wijaya, 2017), laporan arus kas adalah:

“Laporan yang menggambarkan kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Laporan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan Arus Kas menurut Sumarsan (2022:20), menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas:

- a. “Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional (*operational activities*). Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa itu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.
- b. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan investasi (*investment activities*). Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi; misalnya, pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukan kas ke dalam reksadana.
- c. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan (*financing activities*). Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau

pengembalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur. Arus kas masuk pada kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari: hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan dan pembayaran dividen”.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Sujarweni (2022:23), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan”.

Menurut Kieso et al., (2017:267), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar”.

2.1.1.8 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Resmi (2019:391), laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Adapun penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2019:392-395), adalah sebagai berikut:

1. “Perbedaan Prinsip Akuntansi Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip konservatisme.
Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai

taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

b. Prinsip harga perolehan (*cost*).

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat.

Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut 55 menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode penilaian persediaan.

Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out-LIFO*), perbedaan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (*FIFO*).

b. Metode penyusutan dan amortisasi.

Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

c. Metode penghapusan piutang.

Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan guna usaha yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total 56 Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
 - 2) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu
 - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - 4) Hibah, bantuan, dan sumbangan
 - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun
 - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakpastian, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain)
 - 6) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - 1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak

- 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- 1) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura
 - 2) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan
 - 3) Pajak penghasilan
 - 4) Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundangundangan perpajakan
 - 5) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 6) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (timing differences).

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lainlain”.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) dalam Rima Mayangsari (2018) bahwa signalling theory adalah cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, di mana informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan guna memberikan isyarat kepada pemegang saham atau investor mengenai manajemen perusahaan dalam melihat prospek perusahaan kedepannya sehingga dapat membedakan perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas buruk. Laporan perusahaan yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemegang saham dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Minat investor dapat dipertahankan dengan cara memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemegang saham. *Signalling theory* menekankan pentingnya laporan perusahaan yang digunakan sebagai keputusan investasi (Moeljadi & Supriyati, 2014).

Teori sinyal menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan untuk memberikan sinyal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan.

Sinyal yang diberikan oleh perusahaan berupa suatu informasi seperti laporan keuangan tahunan perusahaan terkait upaya manajemen dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sinyal juga dapat berupa informasi yang dapat dipercaya terkait suatu gambaran atau prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang baik akan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar terkait volume perdagangan saham (Sartono, 2010: 392).

Menurut Rahima Purba (2020:35) Informasi yang diterima oleh investor dapat berupa sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang jelek (*bad news*). Sinyal yang baik, apabila laba yang dilaporkan perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan mengalami penurunan maka termasuk sinyal yang jelek bagi investor. Sehingga informasi merupakan unsur penting bagi investor atau pelaku bisnis, karena informasi tersebut menyajikan keterangan, catatan atau gambaran perusahaan baik untuk keadaan masa lalu, saat ini dan keadaan yang akan datang bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisi untuk pengambil keputusan investasi

Hubungan teori sinyal dengan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi signal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi signal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari investor. Dengan kata lain investor tidak akan

menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bernilai tidak baik (Ariyantini et al., 2022)

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

2.1.3.1 Definisi Konservatisme

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No. 2* dalam Savitri (2016:20), konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai

“...reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis telah dipertimbangkan.”
Givoly & Hayn (2000) dalam Savitri (2016:23) menyatakan bahwa

konservatisme akuntansi sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Pangestu & Pratomo (2020), konservatisme akuntansi adalah tindakan atau prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan dimana keuntungan tidak akan diakui sebelum ditemukannya bukti yang kredibel sementara kerugian harus segera diakui.

Sedangkan Menurut Charisma & Suryandari (2021), konservatisme akuntansi adalah prinsip dimana perusahaan tidak tergesa-gesa dalam mengakui laba, namun lebih mengutamakan rugi. Sikap konservatif yang dilakukan manajemen dapat menghindari pembagian deviden yang berlebih kepada pihak investor, dilain sisi sikap konservatif juga dapat memberikan informasi

laba yang berkualitas karena manajemen akan cenderung berhati-hati dalam mengelola perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme akuntansi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi merupakan prinsip penting dalam pelaporan keuangan dengan konsep mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi.

2.1.3.2 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Menurut Savitri (2016:25), PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. “PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.

3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.”

2.1.3.3 Jenis-Jenis Konservatisme Akuntansi

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk Penelitian Dan Pengembangan (RdanD). Beban RdanD dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan RdanD secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).
2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PPdanE atau goodwill apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi aruskasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.3.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45), membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003):

1. *Earning/Stock Return Relations Measures*

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50) konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara return saham terhadap laba.

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EPS_{it} : *Earnings per share* untuk perusahaan i tahun t

P_{it} : Harga pasar pembukaan untuk perusahaan i tahun t

R_{it} : Return saham perusahaan i tahun t

DR_{it} : 1 bila return pasar untuk perusahaan i pada tahun t adalah negatif dan 0 bila sebaliknya.

α_0 : Intersep

α_1 : Koefisien variabel dummy jenis periode

β_0 : Koefisien (slop) regresi

β_1 : Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode

ε_{it} : *Error terms*

2. *Earning/Accrual Measures*

Menurut Dwiputro (2009) dalam Enni Savitri (2016:55) menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan.

Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya. dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

Givoly dan Hayn merumuskan conservatism based on accrual items, sebagai berikut:

$$CONNAC = \frac{(NIO + DEP - CFO) \times (-1)}{TA}$$

Keterangan:

CONACC = Tingkat Konservatisme

NIO = *Net In Come* (laba tahun berjalan)

DEP = *Depreciation of Fixed Assets of Current Year*
(Penyusutan aktiva tetap tahun berjalan)

CFO_{it} = *Net amount of cash flow from operating activies of current year* (Jumlah arus kas dari aktivitas operasi tahun berjalan)

TA = Total Aset

Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47).

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Zhang

dalam Enni Savitri (2016:56), yaitu engan mengalikan conv_accrual dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi nilai conv_accrual menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

Menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Andreas et al (2017), Jika nilai $\text{CONACC} > 0$, artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi. Jika nilai $\text{CONACC} < 0$, artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang rendah. Menurut Sumiari & Wirama (2016), apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negatif, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi

3. *Net Asset Measures*

Menurut Beaver dan Ryan (2000) yang dikutip dalam Enni Savitri (2016:48), pengukuran konservatisme akuntansi dengan pendekatan *Net Asset Measures* dapat dilakukan dengan menggunakan proksi rasio *Market to Book Value* (MTBV), yaitu perbandingan antara nilai pasar ekuitas (*market value of common equity*) dengan nilai buku ekuitas (*book value of common equity*).

Rumus untuk menghoitung market to book ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book}(M/B) \text{ Ratio} = \frac{\text{Market price share of common stock}}{\text{book value per share of common stock}}$$

Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari

nilai pasarnya (Enni Savitri 2016:48) Adapun komponen untuk menentukan Konservatisme Akuntansi yang terdapat dalam rumus Earning/Accrual Measures CONACC menurut Givoly dan Hayn (2002) yaitu depresiasi. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

a. Depresiasi

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsurangsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbedabeda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi lebih penting, sehingga cost yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus (Fahmi, 2015:100).

Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang

menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (Atichasari, 2023: 45), yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (Costs) Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.
2. Umur Ekonomis (Useful-Life) Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
 - b. Keusangan karena waktu.
 - c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.
3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (Salvage Value) Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (junk value) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.
4. Metode Penyusutan Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih

hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

Macam-Macam Metode Depresiasi

Menurut Atichasari (2023: 48) metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu Anda ketahui (Atichasari, 2023: 49), yaitu berikut ini.

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).
Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (activity method). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut
2. Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)
Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai)

aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu

3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun. Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasi yang menurun ada 2, yaitu berikut ini.
 - a. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Year's Digits Method*) Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut
 - b. Metode persentase tetap dari nilai buku (*Metode Saldo yang Menurun/Declining Balance Method*) Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

2. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi atas pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap yang tidak berwujud atau pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Setu Setyawan, 178:2022)

3. Deplesi

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalan. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalan sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah deplesi. Deplesi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Zainal Arifin, 2009:149).

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Siti Resmi (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Hamidah et al., (2022:23), pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi (Hamidah et al., 2022:23).

Sedangkan menurut Malo & Sugeng (2025), *tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis, untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah, ketidaksempurnaan, atau area abu-abu dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini kerap menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan semangat keadilan dan etika perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Pada hakikatnya Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dianggap legal karena berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut yang membuat perusahaan melakukan berbagai cara dalam mengelola beban pajaknya semaksimal mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimum (Hastuti et al., 2022)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), fungsi pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

2. “*Fungsi Budgeteir* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

- dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (PPnBM)
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.4.4 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun

termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (Mamuaya et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Ketentuan ini tercantum pada pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu”. Dan tarif pajaknya tercantum pada pasal 56 ayat (2) yang menyatakan: “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen)”. Kemudian pada pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:

- a) Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak bagi wajib pajak badan pada tahun 2019 adalah sebesar 25%, sebagaimana disebutkan pada

pasal 17 ayat (2a) yaitu: “Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Besar tarif ini mulai berlaku sejak tahun 2010-2019.

Pada tahun 2020-2021 besarnya tarif pajak bagi wajib pajak badan adalah sebesar 22%, dan untuk tahun 2022 adalah sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”.

Berikutnya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%, sebagaimana disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu: “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E menyebutkan bahwa:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 80 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”

2.1.4.5 Tarif Pajak

Menurut Arafat et al., (2021:47-49), salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-undang pajak. Tarif pajak adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya dinyatakan dengan persentase, meskipun bisa juga dengan nilai nominal. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. “Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Tarif ini penggunaannya terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif yang memperhatikan daya pikul wajib pajak. Contohnya seperti Pasal 17 UU PPh.
2. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Tetapi yang perlu diingat bahwa tarif ini tidak pernah digunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.
3. Tarif Proporsional
Tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Ini berarti bahwa pajak yang harus dibayar akan mengikuti jumlah yang dikenakan, atau dengan kata lain semakin besar jumlah yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak, semakin besar juga jumlah pajak yang terutang. Tarif ini digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Tarif Tetap
Tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini digunakan pada Bea Materai.
5. Tarif Advalorem
Suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
6. Tarif Spesifik
Tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu”.

2.1.4.6 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Halim et al. (2018:8), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mortenson dalam Putri & Putra (2017), menyatakan bahwa:

“Tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.”

Dalam usaha perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya perusahaan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada undang-undang perpajak, tax avoidance merupakan bentuk *tax planning* yang digunakan dengan legal dan bertujuan guna mengurangi kewajiban perpajakan (Agustina, 2024).

Berdasarkan beberapa pengertian penghindaran pajak di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang atau celah yang terdapat dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar aturan yang ada. Dengan demikian, tax avoidance tidak termasuk tindakan ilegal, melainkan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih efisien melalui mekanisme yang diperbolehkan oleh hukum perpajakan.

2.1.4.7 Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance* yang *unacceptable*, perbedaan keduanya seperti diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Astuti dan Aryani (2016) adalah sebagai berikut:

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/ tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/ bukan,
3. Sesuai/ tidak dengan spirit dan *Intention of Parliament*, 4
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa”

2.1.4.8 Beda Tetap (Permanent Differences)

Menurut Siti Resmi (2005: 333) dalam Yolanda & Mokoagow (2020), beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini sangat menentukan perbedaan pada laba akuntansi dan laba fiskal.

Hasil perbedaan permanen dalam laba/rugi bersih menurut akuntansi (secara permanen) dengan penghasilan kena pajak (laba) menurut Fiskal. Perbedaan permanen ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan penghasilan.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan dikenakan PPh bersifat final.
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi fiskal negatif maupun positif. Koreksi fiskal negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final. Hal ini menyebabkan laba kena pajak berkurang dan akhirnya akan menyebabkan PPh terhutang lebih kecil. Sedangkan koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi. Hal ini akan menyebabkan laba kena pajak bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terhutang menjadi lebih besar (Rofiani et al., 2020)

2.1.4.9 Beda Temporer (Temporary Differences)

Menurut Depari & Zulaikha, perbedaan temporer merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan antara waktu pengakuan, peraturan, dan metode pencatatan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba perusahaan. Perbedaan temporer terjadi karena ketentuan peraturan perpajakan terdapat penghasilan dan biaya yang boleh dikurangkan dari periode sebelum, sekarang, dan sesudah. Sedangkan ketentuan peraturan akuntansi mengakui pendapatan dan beban saat periode sekarang. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya (PSAK No. 46, 2010).

Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menurut Depari & Zulaikha (2015) adalah sebagai berikut:

1. *Deductible temporary differences* adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (PSAK No. 46). Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam pos laporan keuangan adalah imbalan pasca kerja, biaya garansi, biaya restrukturisasi, biaya litigasi dan lingkungan, piutang tak tertagih, penyisihan persediaan atas penurunan nilai pasar, dan pendapatan sewa di terima dimuka.
2. *Taxable temporary differences* adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak

(rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (PSAK No. 46). Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam pos laporan keuangan adalah penjualan angsuran/piutang dan depresiasi dipercepat menurut pajak.

2.1.4.10 Cara-cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Kurniasih & Sari (2017), cara-cara untuk melakukan tax avoidance, diantaranya ialah:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

2.1.4.11 Keuntungan dan Kerugian Penghindaran Pajak

Menurut Chen et al (2010) dalam Margaretha & Handayani (2021), keuntungan yang didapat dari tindakan tax avoidance, yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan tax avoidance yang dilakukannya.

3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan rent extraction.
4. Tindakan rent extraction merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen et al (2010) dalam Margaretha & Handayani, (2021), mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan tax avoidance antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan tax avoidance yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction”.

2.1.4.12 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Dalam mengukur Penghindaran Pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Rumus pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010:140) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Before Tax}}$$

2. Rumus pengukuran Penghindaran Pajak menurut Sahara & Oktafiani (2022) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

3. Rumus pengukuran Penghindaran Pajak menurut Rahmani (2025) adalah sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

4. Rumus pengukuran Penghindaran Pajak menurut Bahri & Falah (2023), adalah sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Pajak\ Kini}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

5. Rumus pengukuran Perencanaan Pajak menurut Chasbiandani & Herlan (2019) adalah sebagai berikut:

$$Long\ Run\ Cash\ ETR = \frac{\sum Total\ cash\ taxes\ paid}{\sum Total\ Pretax\ Accounting\ Income}$$

6. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Noor dan Matsuki (2009) dalam Widyasari et al., (2021), adalah sebagai berikut:

$$Taxable\ Income = \frac{Current\ tax\ Expense}{Tax\ Rate}$$

7. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Rifaldi & Sari (2022), adalah sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \left(\frac{Pretax\ income_{it} \left(\frac{Tax\ Expense_{it}}{Tax\ Rate_{it}} \right)}{Total\ Aset_{it}} \right)$$

8. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Rosmaria et al., (2021) dalam Merdekawati & Asmara (2025), adalah sebagai berikut:

$$Differential\ ETR = STR - ETR$$

9. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Nabila & Masripah (2025), adalah sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_1 + Total\ Akrua_{it} + C_{it}$$

10. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010:136), adalah sebagai berikut:

$$Unrecognized\ tax\ benefits = Disclosed\ amount\ post - FIN48$$

11. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010:136), adalah sebagai berikut:

$\text{Tax shelter activity} = \text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$
--

12. Rumus untuk mengukur Penghindaran Pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010:136), adalah sebagai berikut:

$\text{Marginal Tax Rate} = \text{Simulated marginal tax rate}$

2.1.5 Nilai Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017:74), nilai perusahaan merupakan:

“... harga yang bersedia di bayarkan oleh para calon investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan maka dapat dipandang baik pula oleh para calon investor, sehingga calon investor akan berlomba-lomba dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan return yang di harapkan.”

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Tiwi Herninta (2019) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.

Menurut Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009), nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk

suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan *price to book value ratio*. Harga yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar saham.

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan adalah

2.1.5.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2012:86), Nilai Perusahaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. “Nilai perusahaan Unggulan Merupakan nilai perusahaan yang tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas nilai perusahaan atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik nilai perusahaan atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika nilai perusahaan tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta gantinya.
2. Nilai perusahaan Pertumbuhan (Registered Stocks) Merupakan nilai perusahaan yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Diatas sertifikat nilai perusahaan dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya.”

2.1.5.3 Karakteristik Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), nilai perusahaan memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh nilai perusahaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil nilai perusahaan menjadi lebih tidak pasti.
2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang nilai perusahaan, pemegang nilai perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan nilai perusahaannya (one share one vote).
3. Memiliki hak terakhir (yunior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi nilai perusahaannya. Hak pemilikan nilai perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain.”

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain:

1. “Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, karena pada perusahaan-perusahaan besar, pemilik saham pada dasarnya terpisah dari manajemen, sehingga kurang berdaya mengubah manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh negatif karena sekalipun perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar, namun modal yang digunakan juga besar, sehingga profitabilitasnya bisa jadi tidak terlalu tinggi dibanding perusahaan dengan ukuran lebih kecil.
2. Profitabilitas Sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga ROA meningkat, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.
3. Pertumbuhan laba sama halnya dengan pertumbuhan laba dan sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga growth of earning after tax meningkat, maka semakin baik kinerja perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.
4. Likuiditas Semakin tinggi likuiditas perusahaan (yang salah satunya tercermin dalam rasio kas atas aktiva lancar), semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat.

5. Inflasi Inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kondisi inflasi akan menurunkan daya beli perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan retensi dana lebih besar agar dapat terus membiayai aktivitasnya.”

2.1.5.5 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2017:138), ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran nilai perusahaan, diantaranya:

1. *Earning per Share (EPS)*

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rasio EPS digunakan untuk melihat tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Nasicha, 2018). Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Earning Per Share (EPS)* Menurut Tandelilin (2010: 374) dalam Nasicha (2018) yaitu:

$$EPS = \frac{\text{laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Deviden}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2. *Price Earning Ratio (PER)*

Price Earning Ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earnings (Riski, 2020).

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Price Earning Ratio* dalam Tresna (2020) yaitu:

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba Per Lembar Saham}}$$

3. *Book Value per Share (BVPS)*

Menurut Ima Andriyani (2016), nilai buku adalah nilai asset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagi. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku : Nilai nominal (Par Value), ialah nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Book Value per Share (BVPS)* dalam Dewanto (2021) yaitu:

$$BVPS = \frac{\text{Aset} - \text{Hutang}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Jumlah Saham Beredar

Menurut Bety Farandani (2016), saham beredar adalah sejumlah saham yang dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan sebagai sarana investasi publik. Jumlah saham beredar adalah jumlah total saham perusahaan yang berada ditangan investor, dimana angka jumlah saham beredar tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan.

4. Tobins'Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio Tobin's q dikembangkan oleh profesor James Tobin (1967), rasio ini merupakan pengukuran kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Tobin's Q adalah suatu gambaran statistik yang memiliki fungsi sebagai pengukur dari nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang, terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Secara matematis Tobin's q dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{MVE + DEBT}{Total Asset}$$

Keterangan :

Q : Tobin's q

MVE : Harga Saham

Debt : Total Hutang

5. Price Book Value (PBV)

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017:74), nilai perusahaan merupakan:

“... harga yang bersedia di bayarkan oleh para calon investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan maka dapat dipandang baik pula oleh para calon investor, sehingga calon investor akan berlomba-lomba dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan return yang di harapkan.”

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Tiwi Herninta (2019)

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat

keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan (Ang, 1997 dalam Pratiwi 2018).

Selain itu, *Price Book Value* merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Menurut Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009), nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan *price to book value ratio*. Harga yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar saham.

Menurut Brigham, E. & Houston (2011) dalam Grace & Nugroho (2022), Nilai perusahaan dapat diukur dengan rumus *Price Book Value* yaitu :

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Per lembar Saham (NBVS)}}$$

Keterangan:

PBV	: Rasio yang menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan.
Harga Saham per Lembar	: Harga pasar saham yang berlaku saat ini
Nilai Buku per Lembar Saham	: Nilai ekuitas per saham yang dimiliki pemegang saham

Rumus nilai buku per lembar saham:

$$BVPS = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham beredar}}$$

Keterangan:

Total Ekuitas	: Selisih antara total aset dan total liabilitas perusahaan
Jumlah saham beredar	: Jumlah saham yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

2.1.5.6 Saham

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan baik berupa dividen atau *capital gain*. Dividen diterima bila emiten mampu menghasilkan laba. Sedangkan *capital gain* akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual di atas harga beli. Harga pasar suatu

saham pada dasarnya adalah merupakan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat saham diperdagangkan. Disisi lain, harga saham juga mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Saham saham perusahaan yang baik kinerjanya akan mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini disebabkan karena saham tersebut diminati oleh banyak investor yang membuat permintaan akan saham tersebut melebihi penawarannya sehingga berdampak pada naiknya harga saham tersebut. Sebaliknya, buruknya kinerja suatu perusahaan dapat mengakibatkan jatuhnya harga saham perusahaan tersebut (Darmayanti, 2016)

Menurut Fahmi (2012 : 86) pasar modal memiliki dua jenis saham yaitu :

- a) Saham biasa (*common stock*), surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nominal (rupiah, dollar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberikan hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham di akhir tahun memperoleh keuntungan dalam bentuk *dividen*.
- b) Saham istimewa (*preferred stock*), surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk *dividen* yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan).

2.1.5.7 Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan harga yang digunakan dalam melakukan transaksi pasar modal yang terbentuk dari mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar (Bety Farandani, 2018) .

Harga saham itu sendiri merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan atau dapat dikatakan juga sebagai salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan (Gordon et al, 2024). Pergerakan harga saham mencerminkan harapan dan perkiraan investor akan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston (2011), harga saham mencerminkan nilai perusahaan, karena harga saham yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham (Brigham & Houston, 2010:7).

Harga saham yang ada di pasar selalu berfluktuasi, atau selalu berubah. Beberapa penelitian mengaitkan harga saham dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham juga akan meningkat. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Biasanya perusahaan yang telah Go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya minimal setiap tiga bulan sekali. Saat ada publikasi laporan keuangan para investor akan melihat kinerja laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jika laba perusahaan meningkat, investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut maka

permintaan terhadap saham tersebut juga akan meningkat, sehingga harga saham akan naik. Hal ini berlaku sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian maka harga saham akan cenderung turun. Informasi yang disampaikan perusahaan melalui laporan keuangan akan menjadi sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang pada akhirnya memengaruhi harga saham.

Menurut Darmayanti (2016), harga saham dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Harga ini merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga pasar

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga ini yang benar-benar mewakili

harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.”

2.1.5.8 Penilaian Saham

Penilaian saham merupakan proses untuk menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan informasi yang tersedia. Menurut Tandelilin (2020), penilaian saham bertujuan untuk menentukan nilai intrinsik yang kemudian dibandingkan dengan harga pasar untuk mengetahui apakah saham tersebut tergolong *overvalued* atau *undervalued*. Menurut Darmayanti (2021), dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis saham, yaitu: nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham.

1. ”Nilai Buku

Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (*emiten*). Nilai buku menunjukkan besarnya penyertaan pemegang saham (*stockholders equity*) di perusahaan. Nilai buku dihitung dengan mengurangi hitung perusahaan dan saham preferen dari jumlah aktiva, sehingga menunjukkan jumlah dana pemegang saham yang digunakan untuk membiayai perusahaan

2. Nilai Pasar

Nilai pasar adalah harga pasar yang berlaku dari suatu emisi saham, dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar secara keseluruhan mengukur nilai dari saham itu. Bila harga pasar saham dikalikan jumlah saham yang beredar akan diperoleh harga saham perusahaan. Dengan kata lain, nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar.

3. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Nilai intrinsik ini memberikan ukuran mengenai nilai dasar dari suatu saham, dan merupakan standar untuk mempertimbangkan apakah saham tersebut di nilai terlalu rendah (*undervalued*), dihargai secara wajar (*fairly priced*), atau dinilai terlalu tinggi (*overvalued*).”

2.2 Kerangka Pemikiran

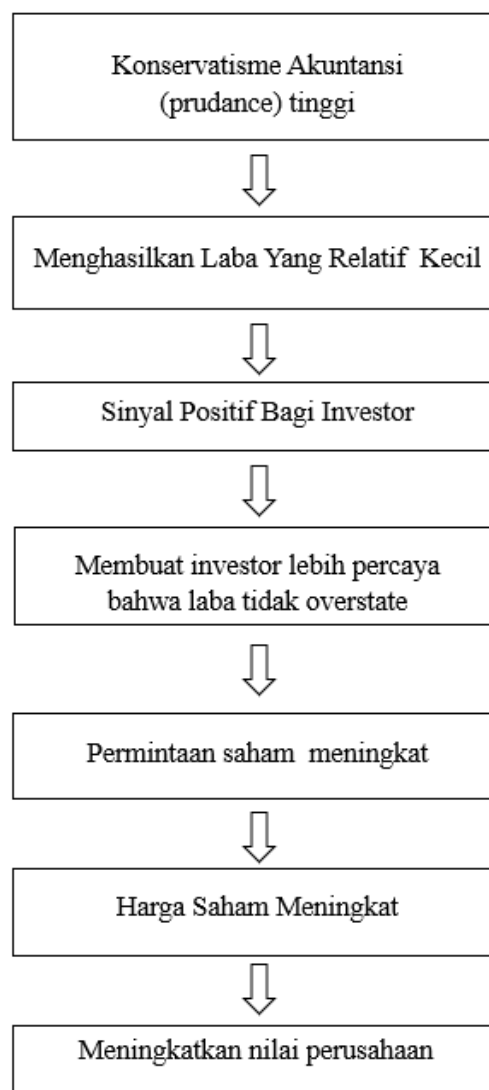
2.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan

Konservatisme akuntansi yang tinggi mencerminkan sikap kehati-hatian perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dengan tidak melebihkan laba dan aset, serta mengakui potensi kerugian secara lebih cepat. Menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement of Concepts No. 2* dalam Ridho et al. (2021), konservatisme akuntansi bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas laporan keuangan ketika perusahaan menghadapi kondisi yang tidak pasti.

Menurut Aristiani et al. (2017) prudence merupakan konvergensi dari konservatisme akuntansi atau yang berarti prinsip kehati-hatian dalam mengakui pendapatan atau aktiva dan beban yang dapat berakibat mengecilkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan guna mengurangi resiko dari ketidakpastian dimasa depan. Dengan diterapkannya prudence oleh pihak manajemen akan menghasilkan laba yang relatif kecil yang juga merupakan suatu sinyal positif kepada investor, yang berarti bahwa mereka telah menerapkan prudence untuk mengurangi keraguan para investor. Dan hal ini akan membuat investor lebih percaya dengan laba yang diakui tidak overstate. Meningkatnya kepercayaan investor akan mendorong peningkatan permintaan saham, yang pada akhirnya menyebabkan harga saham meningkat. Kenaikan harga saham tersebut mencerminkan peningkatan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan pada dasarnya merupakan refleksi dari persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. (Brigham, E. & Houston, 2011)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zulfiara & Ismanto (2019), Wibisono et al. (2019), Basuki dan Indra Gunawan (2019) Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh konservatisme akuntansi terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir
Konservatisme Akuntansi terhadap Nilai Perusahaan

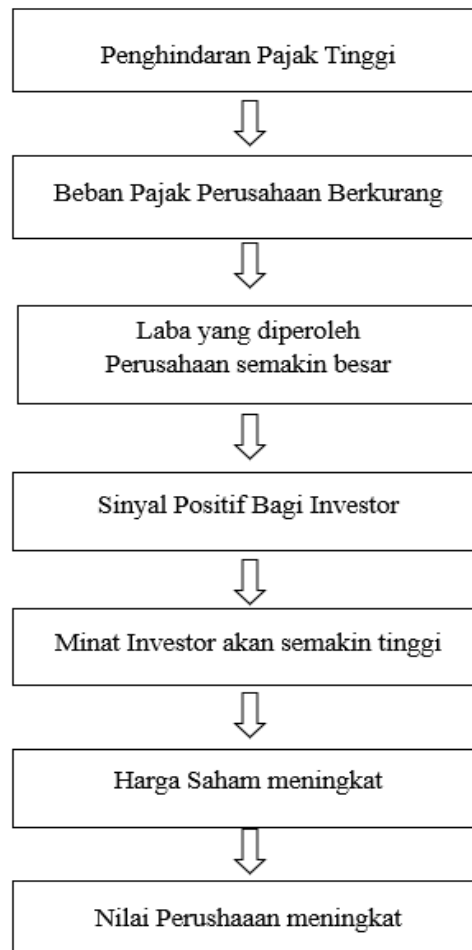
2.2.2 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Adityamurti E & Ghozali I (2017), penghindaran pajak tinggi merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Variabel penghindaran pajak digunakan untuk mengukur bagaimana nilai perusahaan apabila terjadi pengurangan beban pajak pada perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Laba yang lebih besar ini berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor, menunjukkan bahwa perusahaan dikelola secara efisien dan mampu meningkatkan keuntungan yang dapat didistribusikan. Investor yang menerima sinyal positif ini menjadi lebih percaya pada prospek perusahaan, sehingga minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar.

Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (Adityamurti E & Ghozali I, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puradinda Zulfiara dan Juli Ismanto (2019), Isnia Lailatul Amanah (2018), Andrian Novarianto dan Susi Dwimulyani (2019), serta Robby Krisyadi dan Evi Yessy Angery (2021). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kerangka pemikiran pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran
Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2022:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Konservatisme akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H2 : Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.